

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN
LUAS WILAYAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL
(Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode
tahun 2014-2017)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

ERA MILUAWATI UTAMI
B 200 156 007

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN LUAS WILAYAH
TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL**

(Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode tahun 2014-
2017)

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

ERA MILUAWATI UTAMI
B200156007

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Surakarta 7 Februari 2019

Pembimbing



(Eny Kusumawati, SE.,Ak.,MM)

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN LUAS WILAYAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL

(Studi Empiris Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Periode tahun 2014-2017)

Yang Ditulis Oleh

ERA MILUAWATI UTAMI
B200156007

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta


Pada hari Kamis, 7 Februari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Eny Kusumawati, SE.,Ak.,MM
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs Yuli Tri Cahyono,M.M, Ak
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Drs Suyatmin WA, M.Si
(Anggota II Dewan Penguji)

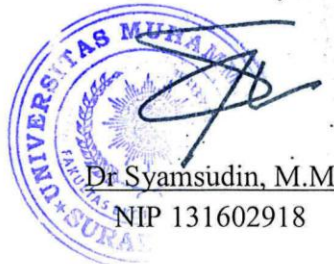

(.....)


(.....)


(.....)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta


Dr Syamsudin, M.M
NIP 131602918

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 11 Februari 2019

Penulis



ERA MILUAWATI UTAMI
B200156007

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN LUAS WILAYAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL

(Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode tahun 2014-2017)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan luas wilayah terhadap belanja modal pada pemerintahan kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2017. Metode penelitian yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 111 laporan keuangan Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diambil dari Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan periode observasi tahun 2014-2017. Hasil penelitian dengan analisis berganda menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, dengan R square 0,768 atau 76,8% variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Luas Wilayah, Belanja Modal.

Abstract

This research is meant to examine the influence of local own source revenue, general allocation fund, special allocation fund, profit sharing fund and territory to the capital expenditure in the districts / cities government in Central Java province in 2014-2017 periods. The research method has been done by using purposive sampling with the numbers of samples are 111 financial statements from Direktorat Jendral Perimbangan dan Keuangan districts / cities in all Central Java provinces. The data is the secondary data has been obtained from districts / cities in Central Java Province with the observation period is 2014-2017. The result of this research which has been carried out by using multiple analysis shows that local own source revenue, special allocation fund, profit sharing fund, and territory give positive influence to the capital expenditure. Meanwhile, the remaining is general allocation fund does not give any significant influence to the capital expenditure, with the R square 0,768 or 76,8%, shows that independent variables give influence to the dependent variable.

Keywords: Local own sources, general allocation fund, special allocation fund, profit sharing fund, territory, capital expenditure.

1. PENDAHULUAN

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya pemberian otonomi daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan setiap daerah dapat meningkatkan pelayanan di berbagai sektor, terutama sektor publik. Dalam meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah wajib mengalokasikan sejumlah dana berupa anggaran Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap daerah dan mengembangkan berbagai program pembangunan berbagai fasilitas publik yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari satu satuan kerja.

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, pendapatan daerah yang dapat menunjang kenaikan belanja modal ada pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, dana perimbangan sendiri ada tiga yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Dengan adanya dana pendapatan asli daerah maupun dana transfer yang berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat, diharapkan belanja modal akan naik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun pelayanan public.

2. METODE

Metode penelitian data pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kuantitatif dengan jenis data sekunder. Data diperoleh www.djpk.kemenkeu.go.id dan www.jatengbps.go.id

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Penelitian ini mengambil sampel Kabupaten/Kota yang terletak di Provinsi Jawa tengah Tahun 2014-2017

dengan data tidak berturut-turut. Pendekatan yang di gunakan dalam mengestimasi model regresi dengan uji asumsi klasik dan uji hipotesis, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, uji F, uji R^2 , dan uji t.

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal, sedangkan variabel independen yang digunakan meliputi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Luas Wilayah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan luas wilayah terhadap belanja modal di Jawa Tengah 2014-2017 digunakan Analisis Regresi dengan model ekonometri sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 DBH + \beta_5 LW + \varepsilon$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal
 PAD =Pendapatan Asli Daerah
 DAU = Dana Alokasi Umum
 DAK = Dana Alokasi Khusus
 DBH = Dana Bagi Hasil
 LW = Luas Wilayah
 α = Konstanta
 β = Koefisien Regresi
 e = Koefisien error

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan luas wilayah terhadap belanja modal di lakukan dengan menggunakan Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis. Untuk menentukan model estimasi terbaik dari hasil estimasi Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji heterokedastisitas, dan Uji Hipotesis.

3.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

3.1.1 Uji Normalitas

Tabel 1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Keterangan	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,076
Asymp. Sig. (2-Tailed)	0,149

Sumber: Hasil Analisis Data 2019

Dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas dilakukan dengan Kolmogorov Smirnov-Test. Berikut hasil pengujian dengan Kolmogorov Smirnov-Test. Hasil pengujian One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov yang didapatkan bahwa Asymp Sig menunjukkan hasil sebesar 0,149 atau 14,9% hal ini menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal, karena nilainya lebih besar dari 0,05 atau 5%.

3.1.2 Uji Autokorelasi

Tabel 2. Uji Autokorelasi

Keterangan	Durbin-Watson	Kesimpulan
Belanja modal	1.851	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber: Hasil Analisis Data 2019

Dalam penelitian ini menggunakan Durbin-Watson, Berdasarkan nilai Durbin Watson menunjukkan nilai 1,851 berarti angka DW berada diantara angka -2 sampai +2 berarti model regresi tidak menunjukkan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan pengganggu pada periode $t-1$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari autokorelasi.

3.1.3 Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Collinearity Statistics			
Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
(Constant)			
PAD	0,626	1,598	Tidak Terjadi Multikolinearitas
DAU	0,391	2,556	Tidak Terjadi Multikolinearitas
DAK	0,689	1,450	Tidak Terjadi Multikolinearitas
DBH	0,808	1,237	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Luas Wilayah	0,544	1,840	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Hasil Analisis Data 2019

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, tidak terdapat satu variabel independen yang memiliki nilai VIF yang lebih besar dari 10 dan nilai tolerance yang memiliki nilai diatas 0,010, hal ini berarti bahwa model regresi terbebas dari adanya korelasi yang tinggi antara variabel independen sehingga kesimpulannya adanya model terbebas dari multikolinearitas.

3.1.4 Uji Heterokedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	T	Sig.	Keterangan
(Constant)			
PAD	-0,041	0.967	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
DAU	1,600	0.113	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
DAK	0,793	0.430	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
DBH	0,384	0.702	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Luas Wilayah	-0,911	0.365	Tidak Terjadi Heterokedastisitas

Sumber: Hasil Analisis Data 2019

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas adalah menggunakan uji Park Glejser. Berdasarkan pengujian heterokedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai diatas 0,05 atau 5%, berarti bahwa model regresi terbebas dari ketidaksamaan variance dari residual satu ke pengamatan yang lain sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari heterokedastisitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

3.2 Hasil Uji Hipotesis

Tabel 5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap alokasi Belanja Modal

Variabel	Coefficients	T	Sig.	Keterangan
(Constant)	21554035742,700			
PAD	0,366	6,994	0,000	Signifikan
DAU	0,079	1,741	0.085	Tidak Signifikan
DAK	0,327	4,506	0,000	Signifikan
DBH	1,388	6,556	0,000	Signifikan
Luas Wilayah	49994027,686	2,700	0.008	Signifikan
Fhitung			69,753	
R ²			0,779	
Adjusted R ²			0,768	
Sig.			0,000	

Sumber: Hasil Analisis data 2019

Nilai signifikansi variabel pendapatan asli daerah menunjukkan nilai 0,000 yang berarti pendapatan asli daerah berpengaruh secara statistik signifikan terhadap belanja modal karena nilai signifikansi variabel pendapatan asli daerah sebesar 0,000 yang dinyatakan lebih kecil dari kriteria yang ditetapkan yaitu nilai signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.

3.2.1 Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi Belanja Modal

Nilai signifikansi variabel dana alokasi umum menunjukkan nilai 0,085 yang berarti dana alokasi umum tidak berpengaruh secara statistik terhadap belanja modal karena nilai signifikansi variabel dana alokasi umum sebesar 0,085 yang dinyatakan lebih besar dari kriteria yang ditetapkan nilai signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat **disimpulkan** bahwa H2 ditolak.

3.2.2 Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap alokasi Belanja Modal

Nilai signifikansi variabel dana alokasi khusus menunjukkan nilai 0,000 yang berarti dana alokasi khusus berpengaruh secara statistik signifikan terhadap belanja modal karena nilai signifikansi variabel dana alokasi khusus sebesar 0,000 yang dinyatakan lebih kecil dari kriteria yang ditetapkan yaitu nilai signifikansi sebesar 0,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima.

3.2.3 Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap alokasi Belanja Modal

Nilai signifikansi variabel dana bagi hasil menunjukkan nilai 0,000 yang berarti dana bagi hasil berpengaruh secara statistik signifikan terhadap belanja modal karena nilai signifikansi variabel dana bagi hasil sebesar 0,000 dinyatakan lebih kecil dari kriteria yang ditetapkan yaitu nilai signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima.

3.2.4 Luas Wilayah terhadap alokasi Belanja Modal

Nilai signifikansi variabel luas wilayah menunjukkan nilai 0,008 yang berarti luas wilayah berpengaruh secara statistik signifikan terhadap belanja modal karena nilai signifikansi variabel /luas wilayah hanya sebesar 0,008 dinyatakan lebih kecil dari kriteria yang ditetapkan yaitu nilai signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 diterima.

4. PENUTUP

Dari hasil pembahasan di bab sebelumnya, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

Uji t pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan luas wilayah berpengaruh secara signifikan, sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Koefisien determinasi R^2 sebesar 0,768, artinya 76,8% variabel belanja modal dapat di jelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan luas wilayah. Sedangkan, sisa nya dijelaskan oleh variasi diluar model.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkarina, Z., & Hermanto, S. B. (2017, Agustus). Pengaruh Pad, Dau, Silpa, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(8), 1-18.
- Bastian, I. (2009). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, R. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau). *JOM Fekom*, 4(2), 4543-4557.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Junaedy. (n.d.). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Manajemen dan Akuntansi*.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyati, S., & Yusriadi. (2017, September). Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Aceh. *Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 211-220.
- Peraturan Pemerintah N0. 71 Tahun 2010 Tentang SAP
- Santoso, Singgih. (2000). *Buku Latihan Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Siregar, Baldrice. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Solikhah, I., & Wahyudin, A. (2014). Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa. *Analisis Akuntansi*, 3(4), 553-562.
- Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh. *Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 183-191.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah daerah
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Dbh Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Wati, M. R., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Kajian Akuntansi*, 1(1), 63-76.
- www.djpk.kemenkeu.go.id
- www.jateng.bps.go.id